

Penulis:

Abul Haris Suryo Negoro, Annie Mustika Putri, Daelami Ahmad, Ichwani Siti Utami,
Aenal Fuad Adam, Dezonda R Pattipawae, Usrotul Hasanah, Cataryn V Adam,
Hartati, Syanni Yustiani, Jose Da Costa Magno.

PEMERINTAHAN

KONSEP, SISTEM DAN TATA KELOLA



PEMERINTAHAN

KONSEP, SISTEM DAN TATA KELOLA

Penulis:

Abul Haris Suryo Negoro, Annie Mustika Putri, Daelami Ahmad, Ichwani Siti Utami,
Aenal Fuad Adam, Dezonda R Pattipawae, Usrotul Hasanah, Cataryn V Adam,
Hartati, Syanni Yustiani, Jose Da Costa Magno.

PEMERINTAHAN

Konsep, Sistem Dan Tata Kelola

Penulis:

**Abul Haris Suryo Negoro, Annie Mustika Putri, Daelami Ahmad, Ichwani Siti Utami,
Aenal Fuad Adam, Dezonda R Pattipawae, Usrotul Hasanah, Cataryn V Adam, Hartati,
Syanni Yustiani, Jose Da Costa Magno.**

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Neneng Sri Wahyuni

ISBN:

978-634-317-169-0

Cetakan Pertama:

Agustus, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Pemerintahan merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui sistem pemerintahan yang efektif, negara dapat menjalankan fungsi pelayanan publik, menjaga stabilitas politik, menegakkan hukum, mendorong pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika global, kemajuan teknologi, dan meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, sistem, dan tata kelola pemerintahan menjadi semakin penting bagi mahasiswa, akademisi, aparatur pemerintah, maupun masyarakat luas.

Buku Pemerintahan: Konsep, Sistem, dan Tata Kelola disusun untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai penyelenggaraan pemerintahan dari perspektif konseptual, historis, kelembagaan, hingga implementasinya dalam praktik. Pembahasan diawali dengan konsep dasar pemerintahan, teori dan sistem pemerintahan, serta sejarah perkembangan pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, buku ini mengulas konstitusi dan dasar negara, penyelenggaraan pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan, kebijakan publik, kepemimpinan pemerintahan, transformasi pemerintahan digital, pengawasan dan akuntabilitas, hingga berbagai tantangan serta arah masa depan pemerintahan di era global dan digital.

Materi dalam buku ini disajikan secara sistematis dengan pendekatan yang mengintegrasikan teori, regulasi, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Setiap bab dirancang untuk membantu pembaca memahami keterkaitan antara konsep-konsep pemerintahan dengan dinamika tata kelola publik yang terus berkembang, sehingga mampu membangun cara berpikir yang kritis, analitis, dan kontekstual dalam memahami berbagai persoalan pemerintahan.

Melalui buku ini diharapkan pembaca memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya pemerintahan yang demokratis, responsif, efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam proses pembelajaran, penelitian, pengembangan keilmuan, serta praktik penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DASAR PEMERINTAHAN	1
A. Pengertian Pemerintahan	1
B. Fungsi dan Tujuan Pemerintahan	12
C. Ruang Lingkup Pemerintahan	25
D. Hubungan Pemerintah dan Masyarakat	34
BAB 2 TEORI DAN SISTEM PEMERINTAHAN	49
A. Pendahuluan	49
B. Latar Belakang	50
C. Teori Pemerintahan	52
D. Sistem Pemerintahan	54
E. Sistem Pemerintahan Parlementer	57
F. Sistem Pemerintahan di Indonesia	59
BAB 3 SEJARAH PEMERINTAHAN INDONESIA	71
A. Pendahuluan	71
B. Pemerintahan Masa Kerajaan	74
C. Pemerintahan Masa Kolonial	82
D. Pemerintahan Pasca Kemerdekaan	95
E. Reformasi dan Perkembangan Pemerintahan	104
BAB 4 KONSTITUSI DAN DASAR NEGARA	123
A. Pendahuluan	123
B. Konstitusi	125
C. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945	129
D. Pancasila Sebagai Dasar Negara	133
E. Hubungan Konstitusi dan Pemerintahan	136
BAB 5 PEMERINTAH DAERAH: KONSEP, KELEMBAGAAN, DEMOKRASI LOKAL, DAN TATA KELOLA	145
A. Konsep Dasar dan Landasan Teoritis Pemerintah Daerah	145
B. Asas dan Kelembagaan Pemerintah Daerah di Indonesia	148

C. Tata Kelola, Pelayanan Publik, Pembangunan Daerah dan Tantangan Kontemporer	157
BAB 6 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.....	163
A. Pendahuluan.....	163
B. Konsep Administrasi Pemerintahan	164
C. Tata Kelola Pemerintahan	167
D. Pelayanan Publik.....	170
E. Reformasi Birokrasi.....	174
BAB 7 KEBIJAKAN PUBLIK.....	185
A. Pendahuluan	185
B. Pengertian Kebijakan Publik	187
C. Proses Perumusan Kebijakan	190
D. Pelaksanaan Kebijakan Publik	196
E. Evaluasi Kebijakan Publik.....	203
BAB 8 KEPEMIMPINAN DALAM PEMERINTAHAN	211
A. Pendahuluan.....	211
B. Konsep Kepemimpinan Pemerintahan	212
C. Gaya Kepemimpinan	217
D. Etika Kepemimpinan.....	221
E. Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan	225
BAB 9 PEMERINTAHAN DIGITAL	235
A. Pendahuluan.....	235
B. Konsep Pemerintahan Digital	237
C. E-Government	243
D. Teknologi Informasi Dalam Pemerintahan Digital.....	247
E. Tantangan Transformasi Digital Pemerintahan.....	253
F. Rangkuman Materi	259
BAB 10 PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH.....	267
A. Pendahuluan.....	267
B. Pengawasan Internal Pemerintah	269
C. Pengawasan Eksternal Pemerintah	273
D. Transparansi dan Akuntabilitas	277
E. Pencegahan Korupsi Dalam Pemerintahan	280

BAB 11 MASA DEPAN PEMERINTAHAN291

 A. Pendahuluan..... 291

 B. Tantangan Pemerintahan Modern 293

 C. Globalisasi dan Pemerintahan..... 296

 D. Inovasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan..... 301

 E. Strategi Penguatan Pemerintahan Yang Efektif 306

GLOSARIUM.....315

PROFIL PENULIS327



BAB 1

KONSEP DASAR PEMERINTAHAN

Abul Haris Suryo Negoro S.IP., M.Si
FISIP Universitas Jember

A. PENGERTIAN PEMERINTAHAN

1. Definisi Pemerintahan

Pemerintahan merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara untuk mengatur kehidupan masyarakat serta mewujudkan tujuan bernegara. Secara umum, pemerintahan dipahami sebagai keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintahan tidak hanya merujuk pada keberadaan organisasi atau institusi negara, tetapi juga

DAFTAR PUSTAKA

- Haboddin, M. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press.
- Hanin, A. L., & Sh, M. (2025). Konsep Dasar Dan Sejarah Hukum Pemerintahan Desa. *Hukum Pemerintahan Desa Dan Desa Adat Di Indonesia*, 13.
- Irawan, A. D. (2026). Konsep Dasar Negara Dan Pemerintahan Di Indonesia.
- Irawan, A. D., & Sh, M. (2026). Konsep Dasar Negara Dan Pemerintahan Di. *Ilmu Politik Dan Sistem Pemerintahan*, 11.
- Negoro, A. H. S., Pahmi, S., Enala, S. H., Holivil, E., Nurdialy, M., Djasuli, M., ... & Arintyas, A. P. R. D. A. (2025). Manajemen Administrasi Publik.
- Negoro, A. H. S., Pahmi, S., Helpiastuti, S. B., Ariany, R., Mana, F. A., Mei, P. C., ... & Enas, U. (2026). Kepemimpinan Publik.
- Negoro, A. H. S., Sasongko, R. W., Wandan, H., Aromatica, D., Haerana, H., Mana, F. A., ... & Ahmad, D. (2025). Pengantar Ilmu Administrasi Publik.
- Nurcholis, H. (2019). Konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Meraja Journal*, 2, 101-108.
- Rohayatin, T. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Deepublish.
- Suacana, I. W. G., Nike Purnamawati, S. I. P., Rahmanudin, D., Christina Bagenda, S. H., Mh, C., Sialana, F., ... & Sh, M. (2025). *Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan*. Cv Rey Media Grafika.
- Subandi, M., Suryawati, D., Widnyani, I. A. P. S., Jaya, H. W., Negoro, A. H. S., Yudawisastro, H. G., & Hidayatulloh, W. *Manajemen Administrasi Pembangunan*. Penerbit Widina.
- Suryawati, D., Sos, S., Ap, M., Riwayat, A., Negoro, A. H. S., Ip, S., ... & Sos, S. (2025). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Penerbit Widina.



BAB 2

TEORI DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Annie Mustika Putri, S.E., M.Ak., Ak, CA
Universitas Muhammadiyah Riau

A. PENDAHULUAN

Bab ini membahas teori dan sistem pemerintahan sebagai dasar untuk memahami bagaimana negara menyelenggarakan kekuasaan publik, merumuskan kebijakan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan administratif, karena di dalamnya terdapat relasi kekuasaan, legitimasi, struktur kelembagaan, pertanggungjawaban, dan interaksi antara negara dengan warga negara. Kajian pemerintahan juga terus berkembang karena perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi menuntut negara untuk bekerja lebih efektif, transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dalam literatur ilmu

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, S., & Nurdin. (2023). Lembaga representatif publik: Relasi kekuasaan dalam perspektif perbandingan sistem presidensial vs sistem parlementer studi kasus Indonesia dengan Inggris. *Jurnal Adhikari*, 2(3), 392–405. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.78>
- Arsil, F. (2023). *Sistem Parlementer Indonesia: Kajian Pemberlakuan Sistem Parlementer di Indonesia*. PT Publica Indonesia Utama.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*.
- Bappenas. (2024). *Musrenbangnas 2024: Bappenas pastikan sinkronisasi pembangunan dengan program presiden terpilih*.
- Basri, A. R., Sawir, M., Kamaluddin, S., & Pongtuluran, R. (2024). Lanskap pemerintahan: Memahami perbedaan dan implikasi sistem presidensial, parlementer, dan semipresidensial. *Journal of Governance and Local Politics*, 6(1). <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i1.1257>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://www.dpr.go.id/dokumen/idih/undang-undang-dasar>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). *Indeks SPBE Nasional meningkat, Menteri Rini: Penguatan integrasi pelayanan publik berbasis digital*.
- Khuluqi, M. A., & Muwahid. (2023). Sejarah sistem pemerintahan dan kekuasaan eksekutif di Indonesia. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(2), 167–180. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.2.167-180>
- Mannagalli, A., Salman, R., Ristawati, R., & Christina Rachmawati, D. U. (2025). Judicial independence sebagai syarat good governance dalam demokrasi konstitusional. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora*

- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-prinsip good governance di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1(1), 40–52.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159.
- Riza, R., & Nainggolan, J. A. (2026). Implementasi prinsip good governance di Indonesia: Tinjauan dari aspek hukum administrasi negara dan hukum internasional. *UNES Law Review*, 8(3), 1097–1106. <https://doi.org/10.31933/4chj2141>
- Rizky, G. P., & Triadi, I. (2024). Perbandingan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dalam hukum tata negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 29997–30002.
- Saragih, J., Nursaimatussaddiya, N., & Fikri Aufa, M. (2024). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. CV. Strata Persada Academia.
- Shively, W. P., & Schultz, D. (2022). *Power & choice: An introduction to political science* (16th ed.). Rowman & Littlefield.
- Suacana, I. W. G., Purnamawati, N., Rahmanudin, D., Bagenda, C., Sialana, F., Din, T., Rukoyah, Haris, U., Ramadhani, M. M., & Fitriana, M. K. (2025). *Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan*. Rey Media Grafika.
- Sumardi. (2025). *Pengantar Ilmu Pemerintahan: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Tahta Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Weible, C. M. (Ed.). (2023). *Theories of the policy process* (5th ed.). Routledge.
- World Bank. (2024). *Worldwide Governance Indicators*.



BAB 3

SEJARAH PEMERINTAHAN INDONESIA

Daelami Ahmad, S.Ag., M.Si
Institut Kemandirian Nusantara (IKNUS) Pandeglang - Banten

A. PENDAHULUAN

Sejarah pemerintahan Indonesia bukan sekadar catatan tentang pergantian raja, presiden, kabinet, atau rezim. Ia adalah riwayat panjang tentang bagaimana kekuasaan dibentuk, dilembagakan, diwariskan, diperebutkan, dan dinegosiasikan kembali. Di dalam sejarah itu, kita menemukan jejak kerajaan, luka kolonialisme, gairah kemerdekaan, ketegangan pusat-daerah, hingga janji Reformasi yang belum selesai. Karena itu, dalam ilmu pemerintahan dan administrasi publik, sejarah pemerintahan Indonesia perlu dibaca sebagai pertemuan antara kesinambungan dan perubahan: kesinambungan tampak pada kuatnya pola patrimonial, birokrasi hierarkis, sentralisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2020). *Cakrawala pelayanan publik di negara dunia ketiga*. CV Sah Media.
<https://osf.io/download/5feb218e9ccb902ceaf14ce/>
- Anderson, B. R. O'G. (1972). The idea of power in Javanese culture. In C. Holt (Ed.), *Culture and politics in Indonesia* (pp. 1–69). Cornell University Press.
- Antlöv, H. (2003). Village government and rural development in Indonesia: The new democratic framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193–214.
<https://doi.org/10.1080/00074910302013>
- Arifin, F. (2024). Pembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia: Studi komparasi UUD 1945 sebelum dan setelah perubahan. *Lex Renaissance*.
<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/35070>
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford University Press.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Berenschot, W., & Mulder, P. (2019). Explaining regional variation in local governance: Clientelism and state-dependency in Indonesia. *World Development*.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X1930141X>
- Boolaky, P. K., Mirosea, N., & Singh, K. (2018). On the regulatory changes in government accounting development in Indonesia: A chronology from colonisation and post-colonisation era. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 8(3), 387–411.
<https://www.emerald.com/jaee/article/8/3/387/193917>

- Booth, A. (1998). *The Indonesian economy in the nineteenth and twentieth centuries: A history of missed opportunities*. Macmillan.
- Breman, J. (2015). *Mobilizing labour for the global coffee market: Profits from an unfree work regime in colonial Java*. Amsterdam University Press.
- Christie, J. W. (1991). States without cities: Demographic trends in early Java. *Indonesia*, 52, 23–40.
- Coedès, G. (1968). *The Indianized states of Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.
- Cribb, R., & Kahin, A. (2004). *Historical dictionary of Indonesia* (2nd ed.). Scarecrow Press.
- Crouch, H. (1978). *The army and politics in Indonesia*. Cornell University Press.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- De Zwart, P. (2022). Inequality in late colonial Indonesia: New evidence on regional differences. *Cliometrica*.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11698-020-00220-3>
- Elson, R. E. (1994). *Village Java under the cultivation system, 1830–1870*. Allen & Unwin.
- Fakih, F. (2023). Colonial domesticity and the modern city: Bandung in the early twentieth-century Netherlands Indies. *Journal of Urban History*.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00961442211015910>
- Fasseur, C. (1992). *The politics of colonial exploitation: Java, the Dutch, and the cultivation system*. Cornell Southeast Asia Program.
- Feith, H. (1962). *The decline of constitutional democracy in Indonesia*. Cornell University Press.
- Furnivall, J. S. (2009). *Netherlands India: A study of plural economy*. Cambridge University Press. Original work published 1944.
- Geertz, C. (1980). *Negara: The theatre state in nineteenth-century Bali*. Princeton University Press.
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective*. Stanford University Press.

- Hall, K. R. (1985). *Maritime trade and state development in early Southeast Asia*. University of Hawai'i Press.
- Harto, J. (2025). Sultan Abu'l Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Agung Banten I: Relasi sultan bagian barat Pulau Jawa dengan Kekhalifahan Utsmaniyyah (1596–1651). *Tarikh: Journal of Islamic History and Civilization*. <https://tarikh.crjis.com/index.php/trjihc/article/view/10>
- Hendriyanto, W. M. K., & Purwanto, E. A. (2025). Intergovernmental relations in public policy implementation: A systematic literature review within the period 2005–2024. In *Proceedings of the Brawijaya Conference on Public Administration*. Atlantis Press. <https://www.atlantis-press.com/article/126019535.pdf>
- Hidayat, A. R., Hospes, O., & Termeer, C. (2025). Why democratization and decentralization in Indonesia have mixed results on the ground: A systematic literature review. *Public Administration and Development*. <https://doi.org/10.1002/pad.2095>
- Iskandar, R. K., & Jambak, F. F. (2025). Village law in the struggle of Indonesian legal policy. *PETITA*. <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/download/469/446>
- Kahin, G. M. T. (1952). *Nationalism and revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Kartodirdjo, S. (1973). *Protest movements in rural Java: A study of agrarian unrest in the nineteenth and early twentieth centuries*. Oxford University Press.
- Legge, J. D. (1961). *Central authority and regional autonomy in Indonesia: A study in local administration, 1950–1960*. Cornell University Press.
- Lev, D. S. (1966). *The transition to guided democracy: Indonesian politics, 1957–1959*. Cornell Modern Indonesia Project.
- Lev, D. S. (1972). *Islamic courts in Indonesia: A study in the political bases of legal institutions*. University of California Press.
- Lombard, D. (1996). *Nusa Jawa: Silang budaya*. Gramedia Pustaka Utama.
- MacIntyre, A. (1991). *Business and politics in Indonesia*. Allen & Unwin.

- Manse, M. (2022). Two sides of the same coin: Direct taxation and negotiated governance in colonial Indonesia. *Journal of Social History*, 56(2), 411–435. <https://academic.oup.com/jsh/article-abstract/56/2/411/6710329>
- Manse, M. (2023). Coerced labour and colonial governance in nineteenth and twentieth century Indonesia. *Labor History*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0023656X.2023.2225418>
- Mietzner, M. (2009). *Military politics, Islam, and the state in Indonesia: From turbulent transition to democratic consolidation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Miksic, J. N., & Goh, G. Y. (2017). *Ancient Southeast Asia*. Routledge.
- Moertono, S. (1981). *State and statecraft in Old Java: A study of the later Mataram period, 16th to 19th century*. Cornell Modern Indonesia Project.
- Mukhlis, M. M. (2025). Regional government autonomy in Indonesia: The ambiguity of the federalism of republic model. *Malaysian Journal of Syariah and Law*. <https://mjsl.usim.edu.my/index.php/jurnalmjsl/article/download/760/465>
- Nani, Y. N., Abdussamad, J., & Mozin, S. Y. (2025). Integrating ethical values and new public services: Strengthening reform and anti-corruption in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*. <https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/25937>
- Nugraha, D., & Aliy, M. F. (2025). Kinship politics and political dynasties in the aftermath of the 2020 local elections: A comparative analysis of kinship based political practices in Sleman and South Tangerang. *Public Policy, Government and Political Studies*. <https://silatene.org/index.php/jppgps/article/download/2/4>
- Oktaviani, A. R., Abadi, I., & Ramadhani, N. Y. (2025). Synergising good governance and social media for effective dialogic accounting in Indonesian local government. *Issues of State and Municipal Administration*. <https://cyberleninka.ru/article/n/synergising-good-governance-and-social-media-for-effective-dialogic-accounting-in-indonesian-local-government>

- Paranata, A. (2025). A systematic literature review of anti-corruption policy: A future research agenda in Indonesia. *Public Organization Review*.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-025-00847-8>
- Pigeaud, T. G. T. (1960). *Java in the 14th century: A study in cultural history*. Martinus Nijhoff.
- Putra, I. M. A. W. W., & Wardhani, A. S. (2024). Decentralization policy implementation in Malang City's public service. *Journal of Transformative Governance and Social Justice*.
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jtragos/article/view/13387>
- Reid, A. (1988). *Southeast Asia in the age of commerce, 1450–1680: Vol. 1. The lands below the winds*. Yale University Press.
- Reid, A. (1993). *Southeast Asia in the age of commerce, 1450–1680: Vol. 2. Expansion and crisis*. Yale University Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Stanford University Press.
- Riggs, F. W. (1964). *Administration in developing countries: The theory of prismatic society*. Houghton Mifflin.
- Robison, R. (1986). *Indonesia: The rise of capital*. Allen & Unwin.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon.
- Rohman, A., Suprojo, A., & Sasmito, C. (2025). Weberian paradigm, new public service, and new public management: Bureaucracy assessment. *Issues of State and Municipal Administration*.
<https://cyberleninka.ru/article/n/weberian-paradigm-new-public-service-and-new-public-management-bureaucracy-assessment>
- Saputra, B., & Suripto, S. (2018). Indigenous public administration: Melihat administrasi publik dari perspektif kearifan lokal. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*.
<https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/180>
- Sartika, D. (2019). Decentralization and regional autonomy in the industrial revolution 4.0 era. *MICEB: Mulawarman International Conference on Economics and Business*.

<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/MICEBProceeding/article/view/7097>

- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.
- Soegiono, A. N., Ningrum, A. P., & Al Ghofiqi, M. D. (2025). The price of politics: Institutional reengineering as anti-corruption dismantlement under Jokowi's administration (2014–2024). *Jurnal Ilmu Sosial*.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/71434>
- Sofyan, Y. M. (2021). Javanese power: A comparative study of the power systems of the Majapahit and Demak kingdoms. *The International Journal of Politics and Sociology Research*.
<https://www.ijobsor.pelnus.ac.id/index.php/ijopsor/article/view/41>
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*.
<https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/mediailmu/article/view/4974>
- Sutherland, H. (1979). *The making of a bureaucratic elite: The colonial transformation of the Javanese priyayi*. Heinemann Educational Books.
- Syukron, B. M. (2025). Membaca ulang konsep otonomi daerah sebagai fragmen dari konsep daerah swatantra masa Kerajaan Nusantara. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. <https://www.das-institute.com/journal/index.php/citizen-journal/article/view/698>
- Tambiah, S. J. (1976). *World conqueror and world renouncer: A study of Buddhism and polity in Thailand against a historical background*. Cambridge University Press.
- Van Klinken, G. (2018). Citizenship and local practices of rule in Indonesia. *Citizenship Studies*.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13621025.2018.1445489>

- Van Niel, R. (2023). *The emergence of the modern Indonesian elite*. Foris Publications.
- Vickers, A. (2013). *A history of modern Indonesia* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Wahid, A. (2018). City and “colonial governance” in late colonial Indonesia: Towards an agenda for historical research. *Paramita: Historical Studies Journal*.
<https://scholar.archive.org/work/xqchbtstv2rbjrlg2ecz2ii2zae/access/wayback/https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/viewFile/10172/pdf>
- Wahyudi, R. (2020). Maladministrasi birokrasi di Indonesia dalam perspektif sejarah. *Jurnal Niara*.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/3295>
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.
- Wicaksono, K. W., Simanjourang, J. Y., & Haq, M. H. Z. (2025). Revisiting the new public administration paradigm in Jokowi’s administration: A systematic literature review. *KnE Social Sciences*.
<https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/download/18048/28246>
- Wijaya, T., & Alauwiyah, F. (2025). The dynamics of marga governance in South Sumatra: A comparative analysis of the Dutch colonial era and the Republic of Indonesia. *Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik*.
<https://journals.unpad.ac.id/responsive/article/view/64474>
- Wiratraman, H. P. (2025). Indonesia’s press freedom and law at twenty-five: Achievements, legal changes and continuing challenges. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.
<https://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/1761>
- Wolters, O. W. (1999). *History, culture, and region in Southeast Asian perspectives* (Rev. ed.). Cornell Southeast Asia Program.



BAB 4

KONSTITUSI DAN DASAR NEGARA

Dr. Ichwani Siti Utami, S.Pd., M.H.
Universitas Pamulang

A. PENDAHULUAN

Setiap negara yang berdaulat memerlukan landasan hukum yang kokoh sebagai pijakan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan hukum itulah yang dalam kajian ilmu pemerintahan dan hukum tata negara dikenal dengan istilah konstitusi dan dasar negara. Keduanya bukan sekadar dokumen formal, melainkan cerminan dari nilai-nilai, cita-cita, dan komitmen kolektif suatu bangsa dalam membangun tatanan negara yang bermartabat, adil, dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A., & Trisno, B. (2019). *Menelusuri Pancasila*. Samudra Biru.
- Anwar, C. (2015). *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 (Revisi)*. Setara Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid 1*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Revisi)*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmadja, I. D. G. (2010). *Hukum konstitusi: Problematika konstitusi Indonesia sesudah perubahan UUD 1945 (Edisi Revisi)*. Setara Press.
- BPIP Republik Indonesia. (2025). *Naskah Sumber Arsip Dasar Negara I : Masa Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 29 Mei s.d. 1 Juni 1945*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Fauzi, A. (2020). *Pancasila: Konteks Sejarah, Filsafat, Ideologi Nasional, Dan Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Madani Media.
- Haba, M. R. (2021). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Scopindo Media Pustaka.
- Hariyono. (2014). *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*. Intrans Publishing.
- Kaelan. (2013). *Negara kebangsaan Pancasila: Kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya*. Paradigma.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). *Pengantar hukum tata negara Indonesia (Cetakan ke-5)*. Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Notonagoro. (1975). *Pancasila secara ilmiah populer*. Pantjuran Tujuh.
- Nufus, A. B., Novitasari, & Mazid, S. (2020). *Pendidikan Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan*. Madani Media.

- Rakhmat, M. (2014). *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Logoz Publishing.
- Sekretariat Jendral MPR RI. (2020). *Panduan Pemasyarakatan: UUD RI Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI*.
- Strong, C. F. (2021a). *Konstitusi Politik Modern: Arti Konstitusional Politik (Terjemahan)*. Nusamedia.
- Strong, C. F. (2021b). *Konstitusi Politik Modern: Tentang Klasifikasi Konstitusi (Terjemahan)*. Nusamedia.
- Taniredja, T., & Suyahmo. (2020). *Pancasila Dasar Negara Paripurna*. Kencana.
- Wheare, K. C. (2020). *Modern Constitution (Terjemahan)*. Nusa Media.



BAB 5

PEMERINTAH DAERAH: KONSEP, KELEMBAGAAN, DEMOKRASI LOKAL, DAN TATA KELOLA

Aenal Fuad Adam, S.Sos., M.A
Universitas Musamus Merauke

A. KONSEP DASAR DAN LANDASAN TEORITIS PEMERINTAH DAERAH

1. Pengertian pemerintah daerah dan pemerintahan daerah

Pemerintah daerah adalah institusi politik-administratif yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan dalam wilayah tertentu. Pemerintah daerah bukan saja dipahami sebagai wakil pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah juga tempat berlangsungnya demokrasi lokal, kontestasi

DAFTAR PUSTAKA

- Berliansyah Putra, D., Wahyuhening Fibriany, F., & Aryadi, H. (2022). Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(1), 108–119. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.516>
- Faguet, J.-P. (2014). Decentralization and Governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Haider-Markel, D. P. (2014). *The Oxford Handbook of State and Local Government*.
- Hajnal, Z. L. (2014). The Context of Local Policymaking: Who or What Governs? In *The Oxford Handbook of State and Local Government* (First Edition). Oxford University Press.
- Hamm, K. E., Hedlund, R. D., & Miller, N. M. (2014). State Legislatures. In *The Oxford Handbook of State and Local Government* (First Edition). Oxford University Press.
- Hanif, N. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo Anggara IKAPI.
- Leroux, K. M. (2014). Local Bureaucracy. In *The Oxford Handbook of State and Local Government* (First Edition). Oxford University Press.
- OECD. (2019). *Making Decentralisation Work*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/g2g9faa7-en>
- Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance?¹. *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Richard, C. F., & Bae, J. (2014). Local Executives. In *The Oxford Handbook of State and Local Government* (First Edition). Oxford University Press.

- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145. <https://doi.org/10.1177/002085238004700205>
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). *Decentralization in developing countries: A review of recent experience*. World Bank.
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Chemma, G. S. (1983). *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*. The World Bank.
- Shah, A. (Ed.). (2006a). *Local governance in developing countries*. World Bank.
- Shah, A. (2006b). *Local Governance in Industrial Countries*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6328-7>
- Smith, B. C. (1985). *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. George Allen & Unwin.
- Watts, R. L. (1998). FEDERALISM, FEDERAL POLITICAL SYSTEMS, AND FEDERATIONS. *Annual Review of Political Science*, 1(1), 117–137. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.1.1.117>



BAB 6

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Dr. Dezonda R. Pattipawae, S.H., M.H., C.MK
Fakultas Hukum Universitas Pattimura

A. PENDAHULUAN

Administrasi pemerintahan merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Materi ini membahas konsep administrasi pemerintahan, prinsip *good governance*, pelayanan publik, serta reformasi birokrasi sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pembahasan ini relevan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang profesional dan birokrasi yang responsif. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DAFTAR PUSTAKA

- David Osborne dan Ted Gaebler, *Reinventing Government* (Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1992)
- Dwight Waldo, *The Study of Public Administration*, New York: Random House, 1955
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1985
- Eko Prasajo, *Reformasi Kedua, Melanjutkan Estafet Reformasi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2009
- Indrajit Richardus Eko, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Andi Offset, Yogyakarta, 2006.
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Leonard D. White, *Introduction to the Study of Public Administration*, Macmillan Company, New York, 1948.
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Max Weber, *Economy and Society*, Berkeley, University of California Press, 1978.
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- , *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development*, UNDP Policy Document, New York, 1997.



BAB 7

KEBIJAKAN PUBLIK

Usrotul Hasanah, S.Sos., M.Si.
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

A. PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengaturan kehidupan berbangsa serta bernegara. Dalam konteks pemerintahan modern, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai keputusan pemerintah semata, melainkan juga sebagai serangkaian tindakan strategis yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Keberhasilan suatu pemerintahan sering kali diukur dari kualitas kebijakan publik yang dihasilkan dan sejauh mana kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2014). *Public policymaking: An introduction* (8th ed.). Cengage Learning.
- Anderson, J. E. (2020). *Public policymaking: An introduction* (9th ed.). Cengage Learning.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson Education.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kingdon, J. W. (2011). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). Longman.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott Foresman and Company.
- Nugroho, R. (2021). *Public policy*. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik di negara-negara berkembang*. Elex Media Komputindo.
- Subarsono. (2019). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & society*, 6(4), 445-488.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Jakarta: Center of Academic Publishing Service, 2007), 19.



BAB 8

KEPEMIMPINAN DALAM PEMERINTAHAN

Dr. Cataryn V. Adam, S.Sos, M.Si
Universitas Nusa Cendana

A. PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan inti dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Dalam konteks administrasi publik dan ilmu pemerintahan, pemimpin tidak sekedar memegang kekuasaan formal, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengarahkan organisasi pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat.

Northouse (2019) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses di mana seseorang memengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pemerintahan, definisi ini memiliki makna yang lebih luas karena melibatkan dimensi kekuasaan, legitimasi,

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Febi Safrin, 2025. Teori Pengambilan Keputusan. PT. Media Penerbit Indonesia cetakan 1
- Anderson, J. E. (2015). Public policymaking: An introduction (8th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning.
- Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York, NY: Free Press.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Burns, J. M. (1978). Leadership. New York, NY: Harper & Row.
- Ciulla, J. B. (2004). Ethics, the heart of leadership (2nd ed.). Westport, CT: Praeger.
- Cohen, M. D., March, J. G., & Olsen, J. P. (1972). A garbage can model of organizational choice. *Administrative Science Quarterly*, 17(1), 1–25. <https://doi.org/10.2307/2392088>
- Connelly, M. S., Gilbert, J. A., Zaccaro, S. J., Threlfall, K. V., Marks, M. A., & Mumford, M. D. (2000). Exploring the relationship of leadership skills and knowledge to leader performance. *The Leadership Quarterly*, 11(1), 65–86. [https://doi.org/10.1016/S1048-9843\(99\)00043-0](https://doi.org/10.1016/S1048-9843(99)00043-0).
- Effendi Onong Uchjana, 1993, Hubungan Manusia dan Humas Bandung
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). Deepening democracy: Institutional innovations in empowered participatory governance. London, UK: Verso.
- Greenleaf, R. K. (1977). Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness. New York, NY: Paulist Press.
- Heifetz, R. A. (1994). Leadership without easy answers. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1969). Life cycle theory of leadership. *Training and Development Journal*, 23(5), 26–34.
- Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. Berkeley, CA: University of California Press.

- Lewin, K., Lippitt, R., & White, R. K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates. *Journal of Social Psychology*, 10(2), 271–299. <https://doi.org/10.1080/00224545.1939.9713366>
- Lindblom, C. E. (1959). The science of "muddling through." *Public Administration Review*, 19(2), 79–88. <https://doi.org/10.2307/973677>
- Mintz, A. (1993). The decision to attack Iraq: A noncompensatory theory of decision making. *Journal of Conflict Resolution*, 37(4), 595–618. <https://doi.org/10.1177/0022002793037004001>
- Northouse, P. G. (2019). *Leadership: Theory and practice* (8th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Osborne, S. P. (2006). The new public governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Simon, H. A. (1947). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organization*. New York, NY: Macmillan.
- Stogdill, R. M. (1974). *Handbook of leadership: A survey of theory and research*. New York, NY: Free Press.
- Thoha Miftah, 2017, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*; Raja Grafindo Persada, Alfabeta, Bandung.
- Thompson, D. F. (1992). Paradoxes of government ethics. *Public Administration Review*, 52(3), 254–259. <https://doi.org/10.2307/977393>
- Hart, P., Rosenthal, U., & Kouzmin, A. (1993). Crisis decision making: The centralization thesis revisited. *Administration & Society*, 25(1), 12–45. <https://doi.org/10.1177/009539979302500102>
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York, NY: United Nations Development Programme.
- Van Wart, M. (2013). Administrative leadership theory: A reassessment after 10 years. *Public Administration*, 91(3), 521–543. <https://doi.org/10.1111/padm.12017>

- Vroom, V. H., & Yetton, P. W. (1973). Leadership and decision making. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
- World Bank. (1992). Governance and development. Washington, DC: The World Bank.
- Yukl, G. (2013). Leadership in organizations (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.



BAB 9

PEMERINTAHAN DIGITAL

Dr. Hartati, S.H., M.H.

Rts. Fanny Inayah, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Jambi

A. PENDAHULUAN

Kesenjangan antara ambisi digitalisasi pemerintahan dan kapasitas kelembagaan birokrasi Indonesia masih lebar. Berbagai inisiatif telah diluncurkan dalam satu dekade terakhir, namun kemampuan pemerintah mengadopsi logika digital belum mampu mengimbangi tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah diakses, terintegrasi, dan aman. Teknologi tidak lagi cukup dipandang sebagai alat untuk mempercepat administrasi. Transformasi digital menuntut perubahan kelembagaan yang mendalam, bukan sekadar digitalisasi prosedur yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, B. (2023). *Electronic government*. Unhas Press.
- Fountain, J. E. (2001). *Building the virtual state: Information technology and institutional change*. Brookings Institution Press.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment: An international text*. SAGE Publications.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government* (Edisi ke-2). PREINEXUS.
- Indrayani, E. (2020). *E-government: Konsep, implementasi, dan perkembangannya di Indonesia*. LPP Balai Insan Cendekia.
- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan publik: Pelayanan administrasi terpadu kecamatan*. CV Indra Prahasta.
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., Silalahi, M., Yendrianof, D., Sari, A. P., Supriadi, M. N., Happy, M., Sari, N., & Bahri, S. (2020). *Pelayanan publik* (J. Simarmata, Ed.). Yayasan Kita Menulis.

B. Artikel Jurnal

- Amrozi, Y., Aini, N., & Munadhiroh, Z. (2022). Peta perkembangan e-government di Indonesia. *JSI: Jurnal Sistem Informasi*, 14(1), 2465–2472.
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(1), 71–95. doi:10.15642/sosyus.v3i1.401
- Djabbari, M. H., B., I., Nugroho, T. C., Amiruddin, I., & Yanto, E. (2024). Implementasi e-government dalam pelayanan publik berbasis website di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 158–170. doi:10.26618/kjap.v10i2.15588

- Gil-García, J. R., & Pardo, T. A. (2005). E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations. *Government Information Quarterly*, 22(2), 187–216. doi:10.1016/j.giq.2005.02.001
- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3), 221–236. doi:10.1016/j.giq.2015.07.001
- Juliarso, A. (2019). Analisis implementasi e-government dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 10–15. doi:10.23969/kebijakan.v10i1.1417
- Mardiana, M., & Alauddin, M. R. S. (2022). Implementation of e-government in regions: Study on Bombana Public Service Mall. *Jurnal Office*, 8(2), 349–360. doi:10.26858/jo.v8i2.43636
- Mensah, I. K. (2020). Impact of government capacity and e-government performance on the adoption of e-government services. *International Journal of Public Administration*, 43(4), 303–311. doi:10.1080/01900692.2019.1628059
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. doi:10.1016/j.giq.2019.06.002
- Mulyana, G. (2021). Model kepemimpinan untuk transformasi e-government di Indonesia. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 3(1), 50–59.
- Nurfadillah, A., Nursamsir, & Mardiana. (2025). Penerapan e-government pada sektor pelayanan publik: Studi kasus aplikasi OpenSID di Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka. *PENA BANGSA: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif*, 1(1), 1–14. doi:10.69616/pb.v1i1.256
- Nurhakim, M. R. S. (2014). Pengaruh implementasi e-government terhadap perubahan budaya birokrasi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan modern. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu*

dan Praktek Administrasi, 11(3), 403–422.
doi:10.31113/jia.v11i3.59

Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah. (2020). Kolaborasi dan e-literacy: Kunci keberhasilan inovasi e-government pemerintah daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80.
doi:10.24258/jba.v16i1.603

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. (2003). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional*.

- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.



BAB 10

PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH

Syanni Yustiani, S.S.T., M.Ak
Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)

A. PENDAHULUAN

Salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah birokrasi Indonesia menyita perhatian nasional ketika seorang pejabat tinggi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyelewengan proyek pengadaan identitas kependudukan elektronik bernilai triliunan rupiah. Ironi terbesar bukan terletak pada besarnya nilai kerugian yang diperkirakan mencapai lebih dari dua triliun rupiah, melainkan pada fakta bahwa lembaga pemeriksa keuangan negara sesungguhnya telah mendeteksi ketidakberesan sejak tahun-tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2025). Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2026). Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi sebagaimana diubah dengan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2016). Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024.

Literatur Akademik

- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission [COSO]. (2013). Internal control—Integrated framework: Executive summary. COSO.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Klitgaard, R. (1988). Controlling corruption. University of California Press.
- Moeller, R. R. (2016). Brink's modern internal auditing: A common body of knowledge (8th ed.). John Wiley & Sons.
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112–126.
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why anticorruption reforms fail—Systemic corruption as a collective action problem. *Governance*, 26(3), 449–471.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform (2nd ed.). Cambridge University Press.

The Institute of Internal Auditors [IIA]. (2020). The IIA's Three Lines Model: An update of the Three Lines of Defense. The Institute of Internal Auditors.

United Nations. (2004). United Nations Convention against Corruption. United Nations Office on Drugs and Crime.



BAB 11

MASA DEPAN PEMERINTAHAN

Jose da Costa Magno
Nama Instansi

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia kontemporer memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan sedang mengalami perubahan yang bersifat struktural dan fungsional secara mendalam akibat meningkatnya kompleksitas lingkungan global. Dalam situasi ini, pemerintahan modern tidak lagi dapat dipahami sebatas institusi hierarkis yang menjalankan fungsi administratif dan kekuasaan negara, melainkan telah berkembang menjadi aktor tata kelola yang memiliki tanggung jawab luas dalam penyediaan layanan publik, pengelolaan konflik sosial, serta peningkatan daya saing nasional di tengah arus globalisasi yang semakin terintegrasi (World Bank, 2017). Kondisi tersebut menuntut

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bovaird, T., & Löffler, E. (2009). *Public management and governance* (2nd ed.). Routledge.
- Giddens, A. (2003). *Runaway world: How globalization is reshaping our lives*. Routledge.
- Held, D., & McGrew, A. (2007). *Globalization/anti-globalization: Beyond the great divide* (2nd ed.). Polity Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and interdependence* (4th ed.). Pearson.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Nabatchi, T., & Leighninger, M. (2015). *Public participation for 21st century democracy*. Jossey-Bass.
- OECD. (2019). *Government at a glance 2019*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/gov/government-at-a-glance-2019-8ccf5c38-en.htm>
- OECD. (2019). *The path to becoming a data-driven public sector*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/gov/the-path-to-becoming-a-data-driven-public-sector-059814a7-en.htm>
- OECD. (2020). *Digital Government Index: 2019 results*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/gov/digital-government/>
- Peters, B. G. (2018). *The politics of bureaucracy: An introduction to comparative public administration* (7th ed.). Routledge.
- Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton & Company.
- Schwab, K. (2019). *The global competitiveness report 2019*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth>

- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton & Company.
- Transparency International. (2021). *Corruption perceptions index 2021*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>
- United Nations. (2022). *UN E-Government Survey 2022: The future of digital government*. United Nations Department of Economic and Social Affairs. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2022>
- World Bank. (2016). *World development report 2016: Digital dividends*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016>
- World Bank. (2017). *World development report 2017: Governance and the law*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2017>
- World Bank. (2021). *Data for better lives: World development report 2021*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2021>
- World Economic Forum. (2020). *The future of jobs report 2020*. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2020>
- Tomlinson, J. (1999). *Globalization and culture*. University of Chicago Press

PROFIL PENULIS

Abul Haris Suryo Negoro, S.IP., M.Si



Kelahiran Jember. Pada tahun 2006 meraih Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Pada Tahun 2009, Meraih Gelar Master Ilmu Administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Jember. Aktif dalam penelitian yang berbasis keilmuan ilmu politik dan ilmu administrasi dengan konsentrasi kebijakan publik dan Pemerintahan Daerah. Penulis saat ini aktif

dalam Riset Group “Institute maritime for studies” Universitas Jember dan menjadi Pengurus Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) Jawa Timur. Selain itu, menjadi pengurus Organisasi Profesi yaitu Indonesian Association Public Administration (IAPA) Jawa Timur dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Jember. Pemakalah di beberapa acara seminar baik internasional maupun nasional. Memiliki beberapa publikasi Jurnal Internasional dan nasional, menerbitkan beberapa buku referensi yang berjudul Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (2019) dan Kepemimpinan Kepala Daerah Pascapilkada Langsung dan Era Otonomi Daerah (2021). Pengalaman pekerjaan penulis selama ini beragam, mulai peneliti, konsultan dan dosen. Sejak tahun 2015, menjadi dosen PNS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Annie Mustika Putri, S.E., M.Ak., Ak, CA



Penulis lahir di Pekanbaru pada 05 Februari 1991. Penulis memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Program Studi Akuntansi Universitas Riau, kemudian melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di Universitas Riau. Pada tahun 2016, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Akuntansi di Universitas Riau. Saat ini, penulis

merupakan dosen tetap pada Program Studi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau.

Daelami Ahmad, S.Ag., M.Si



Dosen Tetap Institut Kemandirian Nusantara (IKNUS) Pandeglang – Banten. Lahir di Banyuwangi pada 10 Juli 1974, ia menempuh pendidikan Sarjana pada Program Studi Peradilan Agama, Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Administrasi di STIA YAPPAN Jakarta. Perjalanan profesionalnya dimulai 1998 sebagai dosen tetap dan pengelola administrasi sumber daya manusia di STIA Mandala Indonesia Jakarta. Sejak itu, ia terus mengabdikan diri dalam dunia pendidikan tinggi melalui berbagai amanah strategis, antara lain sebagai Wakil Ketua III STIA Banten, Ketua STIA Banten Pandeglang, Direktur Akademi AKPI Serang, Wakil Ketua II STIKes Ichsan Medical Centre Bintaro, Direktur LSP Caregiver, Direktur LKP Ichsan Medical Centre, Wakil Direktur II Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada, Wakil Rektor II Universitas Salakanagara hingga kini mengemban amanah sebagai Direktur Pengembangan dan Bisnis Universitas Salakanagara. Selain aktif di perguruan tinggi, ia juga berkhidmat sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Mandiri Cileles, Lebak, Banten. Pengalamannya tidak hanya terbatas pada dunia akademik. Ia pernah berkiprah dalam bidang penerbitan dan manajemen profesional sebagai Operation Manager, Editorial Manager, dan General Manager pada sejumlah lembaga penerbitan. Dalam organisasi, ia aktif dalam berbagai wadah pendidikan dan kemahasiswaan, antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ciputat, APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) Wilayah IV-B Banten, BAPOMI (Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia) Provinsi Banten, APVOKASI (Aliansi Pendidikan Vokasi Seluruh Indonesia), dan APPERTI (Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta) Wilayah Banten. Kiprah ini menunjukkan komitmennya dalam memperkuat jejaring, advokasi, dan kolaborasi pendidikan tinggi.

Dr. Ichwani Siti Utami, S.Pd., M.H.



Penulis lahir di Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 13 Januari 1989. Pendidikan sarjana penulis ditempuh pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang, lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis memperoleh gelas Magister Hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang pada tahun 2014. Pada tahun 2024 penulis berhasil menyelesaikan studi doctor pada Program Pascasarjana Universitas Pakuan dan memperoleh gelar doctor dalam bidang Manajemen Pendidikan pada. Saat ini peneliti aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Penulis aktif mengajar sebagai dosen tetap di Universitas Pamulang sejak tahun 2014 dan diberi amanah sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang. Pengalaman berorganisasi antara lain menjadi sekretaris Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Knl) Wilayah Banten Tahun 2021 - sekarang, sebagai sekretaris Asosiasi Kelembagaan Dan Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum Seluruh Indonesia (Perwakilan Wilayah LLDIKTI IV) tahun 2024-2027.

Aenal Fuad Adam, S.Sos., M.A



Penulis merupakan dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Universitas Merauke. Bidang kajian yang menjadi fokus akademiknya meliputi politik dan tata kelola wilayah perbatasan, politik institusional, serta politik lokal. Dalam aktivitas akademik dan keilmuannya, penulis menaruh perhatian pada dinamika hubungan antara negara, masyarakat, dan lembaga politik, khususnya dalam konteks wilayah perbatasan yang memiliki karakter sosial, politik, dan tata kelola yang khas. Sebagai akademisi di bidang ilmu politik, Aenal Fuad

Adam aktif mengembangkan kajian yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan, kelembagaan politik, serta praktik politik lokal di daerah. Fokus tersebut menjadi bagian dari kontribusinya dalam memperkaya pemahaman mengenai politik Indonesia, terutama pada wilayah-wilayah strategis yang memiliki tantangan pemerintahan, pembangunan, dan relasi sosial-politik yang kompleks.

Dr. Dezonda R. Pattipawae, S.H., M.H., C.MK



Penulis lahir di Ambon, 16 Desember 1975, Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Kristen Urimesing B2 Ambon, lulus tahun 1988, Sekolah Menengah Pertama Kristen YPKPM Ambon, lulus tahun 1991, Sekolah Menengah Atas Kristen YPKPM Ambon, lulus tahun 1994, Sarjana Hukum (S1) Universitas Pattimura Ambon lulus tahun 2000, Magister Hukum (S2) Universitas Tujuh

Belas Agustus Tahun 1945 (Untag) Jakarta, lulus tahun 2009, Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta Tahun 2020. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Karya tulis ilmiah penulis : Tinjauan Eksekusi Putusan Sela Dalam Bentuk Schorsing Pada Pengadilan Tata Usaha Negara; Penetapan Waktu Pelaksanaan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Daerah Karakteristik Wilayah Kepulauan; Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi; *General Principles of Good Governance in Execution in State Administrative Courts Policy and Globalization*; *Application Of Execution Of Forced Money (Dwangsom) On Country Buiness Justice*; Putusan Tata Usaha Negara Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Tidak Dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara; Kekuatan Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; *Due To The Legal Non-Compliance of State Administrative Officers With Te Implementation of Forced Money (Dwangsom) In The Excution of State Administrative Decisions*; Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Terhadap Ketidakpatuhan Pejabat TUN; Kekuatan

Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Keabsahan Keputusan Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Barat tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Lima Karateker.

Usrotul Hasanah, S.Sos, M.Si.



Penulis Lahir Di Situbondo tanggal 25 Agustus 1973. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Administrasi Negara dan melanjutkan S2 pada Jurusan Administrasi Publik. Penulis dapat dihubungi di email : usrotulhasanah@unars.ac.id

Dr. Cataryn V. Adam, S.Sos, M.Si



Cataryn V. Adam adalah seorang akademisi yang mendalami latar belakang pendidikan Ilmu Administrasi Negara S1 di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, S2 di Universitas Padjadjaran Bandung dan menyelesaikan studi S3 di Universitas Nusa Cendana Kupang terkait Reformasi Birokrasi. Saat ini sebagai dosen pada Program Studi Administrasi Publik (S1,S2) dan Studi Pembangunan (S2) Universitas Nusa Kupang, aktif dalam kegiatan tugas pengajaran, pengabdian maupun penelitian. Melalui tulisan ini ingin memberikan pencerahan dan kontribusi kepada pemerintah sebagai pemimpin dan administrator publik agar selalu mengimplementasikan gaya kepemimpinan dan etika pemerintahan serta pengambilan keputusan yang di dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan secara optimal agar masyarakat atau publik merasa puas terhadap layanan yang di berikan oleh pemerintah di zaman modern saat ini.

Dr. Hartati, S.H., M.H.



Penulis lahir di Jambi, pada tanggal 3 Desember 1972. Pada tahun 1995, penulis berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kemudian, pada tahun 2004, berhasil memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. Serta, pada tahun 2008, penulis melanjutkan kembali Pendidikan Program

Doktoral (Dr.) di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung dengan predikat cumlaude. Saat ini penulis adalah dosen tetap dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi periode tahun 2025-2029, menjadikannya perempuan pertama yang memimpin fakultas tersebut. Sebagai Lektor Kepala, penulis memiliki bidang kepakaran di bidang Hukum Administrasi Negara, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Lingkungan. Selain itu, penulis juga aktif dalam penelitian dengan fokus pada Hukum Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Otonomi Daerah. Penulis mengampu berbagai mata kuliah, antara lain Hukum Administrasi Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Lingkungan, Filsafat Hukum, Hukum Pemerintahan Daerah, dan masih banyak mata kuliah lainnya yang diajarkan. Penulis juga aktif dalam penulisan buku, penelitian, pengabdian masyarakat, serta telah banyak mempublikasikan karya ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam peranannya sebagai Dekan, penulis berkomitmen untuk memajukan pengembangan ilmu hukum di Indonesia melalui peningkatan kualitas Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memperkuat kerja sama dengan institusi hukum lainnya.

Rts. Fanny Inayah, S.H., M.H.



Penulis lahir pada tanggal 14 Oktober 1999 di Jambi. Pada tahun 2021, berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan masa studi 3 Tahun 10 Bulan dan memperoleh predikat cumlaude. Selanjutnya pada tahun 2024, penulis melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dan berhasil meraih gelar Magister Hukum (M.H.) dengan masa studi 1 Tahun 7 bulan dan kembali memperoleh predikat cumlaude, serta dinobatkan menjadi wisudawan terbaik pada angkatannya. Saat ini, penulis mengabdikan sebagai dosen CPNS dengan jabatan Asisten Ahli (AA) di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan. Penulis juga aktif dalam penulisan karya ilmiah dan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan di berbagai jurnal terakreditasi nasional maupun jurnal internasional

Syanni Yustiani, S.ST., M.Ak.



Penulis lahir di Garut pada tanggal 16 Mei 1987. Ia menyelesaikan pendidikan D4 di bidang Akuntansi dari Politeknik Keuangan Negara STAN pada tahun 2013. Selanjutnya, Syanni melanjutkan studinya dan meraih gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) dari Universitas Indonesia pada tahun 2017. Syanni saat ini berstatus menikah dan dikaruniai tiga anak laki-laki. Dalam kariernya sebagai dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN sejak 2019, ia mengajar berbagai mata kuliah yang berfokus pada bidang akuntansi dan keuangan, antara lain Audit, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Biaya, Manajemen Keuangan, dan Analisis Laporan Keuangan.

Jose da Costa Magno, M.RI



Penulis adalah seorang Dosen tetap Pada Universidade Nacional Timor-Lorosa'e, perjalanan karier akademik dimulai pada tahun 2000, sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Nasional Timor Lorosa'e (UNTIL). Pada masa awal mengajar (2000–2002), mengampu sejumlah mata kuliah dasar dalam bidang politik. Dua tahun kemudian, diangkat menjadi Ketua Jurusan Pembangunan Masyarakat (2002–2005). Posisi ini memberikan peluang untuk berperan langsung dalam memperkuat kapasitas lokal dan membangun partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional pascakemerdekaan. Dedikasinya yang kuat terhadap pengembangan pendidikan, memberikan peluang terpilih pada posisi Dekan FISIP UNTL pada tahun 2005 hingga 2009. Di bawah kepemimpinannya, fakultas mengalami berbagai penguatan, baik dari sisi kurikulum, tata kelola kelembagaan, maupun pembukaan ruang kerja sama dengan mitra-mitra internasional. Ia juga menjadi salah satu figur penting dalam mendorong transformasi pendidikan sosial-politik di lingkungan kampus menuju arah yang lebih terbuka dan visioner. Pada tahun 2010-2013, melanjutkan studi pascasarjana di Portugal, mengambil program Master Hubungan Internasional di Universidade do Minho, salah satu universitas unggulan di Portugal dan menyelesaikan , dengan fokus penelitian pada sektor energi dan geopolitik dengan judul *“Segurança Energética: O Caso dos Hidrocarbonetos em Timor-Leste”* yang menelaah dinamika keamanan energi dalam konteks sumber daya alam Timor-Leste. Pada tahun 2014, kembali mengajar di Departemen Hubungan Internasional , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Nacional Timor Lrosa'e . Fokus pada bidang pengajaran mata kuliah Teori Hubungan Internasional dan Metodologi Penelitian Hubungan Internasional. Pada September 2024 dipercaya menjadi wakil dekan urusan Akademik pada FISIP-UNTIL.

PEMERINTAHAN

KONSEP, SISTEM DAN TATA KELOLA

Buku ini menyajikan pembahasan yang komprehensif mengenai konsep dasar pemerintahan, sistem penyelenggaraan pemerintahan, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang menjadi fondasi dalam kehidupan bernegara. Materi diawali dengan pembahasan mengenai hakikat pemerintahan, perkembangan paradigma pemerintahan, fungsi dan kewenangan pemerintah, serta hubungan antara negara, pemerintah, dan masyarakat. Pembaca juga diajak memahami bagaimana sistem pemerintahan dibangun berdasarkan konstitusi, prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.

Selanjutnya, buku ini mengupas berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, mulai dari sistem pemerintahan, desentralisasi, otonomi daerah, administrasi publik, pelayanan publik, kebijakan publik, kepemimpinan pemerintahan, hingga penerapan prinsip-prinsip good governance. Pembahasan juga menyoroti tantangan pemerintahan di era digital, transformasi birokrasi, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Disusun secara sistematis dengan pendekatan akademik yang aplikatif, buku ini dilengkapi dengan contoh implementasi, ilustrasi, studi kasus, rangkuman materi, dan latihan evaluasi untuk memperkuat pemahaman pembaca. Oleh karena itu, buku ini sangat tepat dijadikan referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, aparatur sipil negara, praktisi pemerintahan, maupun masyarakat yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, profesional, akuntabel, dan adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman.

 www.penerbitwidina.com
 @penerbitwidina
 penerbit widina
 penerbitwidina@gmail.com
 widina store
 widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
 0815-7000-699



SCANME

Pemerintahan

ISBN 978-634-317-169-0



9

786343

171690